

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

**"HEGAULATAN EKONOMI INDONESIA DALAM MENYONGSONG AEC 2015:
HARAPAN, TANTANGAN, DAN PELUANG"**

DAFTAR ISI

No	Judul/Penulis/Institusi	Halaman
01	Ungkapan Subsidi Bunga untuk Penguatan Daya Saing UMKM pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Yeni (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang)	1-10
02	Integrasi Investasi dan Tabungan Negara Indonesia dan Singapura dengan Perubahan Struktur Yeni (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang)	11-24
03	Identifikasi Skenario Pemerintah Kota Padang Dalam Mengembangkan Kota Padang Menjadi Kota Metropolitan Identifikasi Skenario Pemerintah Kota Padang Dalam Mengembangkan Kota Padang Menjadi Kota Metropolitan Yosi Suryani, SE, M.Si (Politeknik Negeri Padang)	25-46
04	Modal Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Primadona (Politeknik Negeri Padang)	47-61
05	Implementation Principles "Reinventing Government" In The City Of Sungai Penuh Naita Ekawati, SE., MM dan Nike Desilvia, S.E (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci)	62-70
06	Peluang Sumatera Selatan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Melalui Bonus Demografi Sari Lestari Zainal Ridho (Politeknik Negeri Sriwijaya)	71-79
07	Analisis Efektifitas Pelaksanaan PP No. 46/2013 dan Potensi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Charoline Cheisviyanny (Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang)	80-92
08	Kendala Implementasi Program Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Kapalo Koto Kota Padang Varienni Wira, Novirman Trinanto, Nova Dilastri (Politeknik Negeri Padang)	93-111
09	Dinamika Kemitraan Abg Dalam Meningkatkan Peran Ekonomi Kreatif (Kasus Pada Kerajinan Sulaman Kabupaten Lima Puluh Kota) Reni Endang Sulastri, Nova Dilastri, Primadona	112-132
10	Pengaruh Variabel Demografi dan Modal Manusia Terhadap Nilai Produksi (PDRB) Propinsi-Propinsi di Indonesia Ariyani	133-150
11	<i>Knowledge Management</i> : Analisis Iklim Organisasi pada Niat Berbagi Pengetahuan Sowidji Widoatmojo (Universitas Tarumanegara)	151-162
12	Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Strategi Pemasaran Pempek (Makanan Khas Palembang)	163-177

KEBIJAKAN SUBSIDI BUNGA UNTUK PENGUATAN DAYA SAING UMKM PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Idris

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
idris_unp@yahoo.co.id

Abstract

Asian Economic Community (AEC) will be implemented next year (2015). It will be an opportunity and challenge for the local businessmen including Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). AEC is an opportunity because it gives opportunity to enter a new large market. It is also said as a challenge for the UMKM's products because they will compete with the other products from other Asean countries. In taking the opportunity and facing the challenges, UMKM is faced with the capital problem such as high interest. Even though the government and the Indonesian Bank have made various credit policies and technical aids to improve the competitiveness of UMKM, however UMKM is not able to access the credit provided. Therefore the government needs to formulate the policy to strengthen the competitiveness by giving the interest subsidy. By implementing the policy of interest of subsidy, the government can save the budget and the subsidy will reach the target.

Keywords: AEC, UMKM, interest subsidy

Abstrak

AEC (Asian Economic Community) yang akan diterapkan pada 2015 merupakan suatu peluang dan tantangan bagi pelaku usaha didalam negeri, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). AEC dikatakan sebagai peluang, karena memberikan kesempatan untuk memasuki pasar baru yang luas, dan dikatakan memberikan tantangan bagi produk UMKM dalam negeri karena akan bersaing dengan produk-produk dari Negara-negara Asean lainnya. Dalam merebut peluang dan menghadapi tantangan tersebut, UMKM dihadapkan pada masalah permodalan, yaitu harapan tingkat suku bunga yang tinggi. Walaupun pemerintah dan Bank Indonesia telah membuat berbagai macam skim kredit dan bantuan teknis untuk meningkat daya saing UMKM, namun UMKM tersebut masih belum mampu mengakses layanan kredit perbankan yang disediakan. Untuk itu dalam rangka penguatan daya saing UMKM, maka pemerintah perlu merumuskan suatu kebijakan pemberian subsidi bunga. Melalui kebijakan pemberian subsidi bunga, maka pemerintah dapat menghemat anggaran dan memberikan subsidi tepat sasaran.

Kata Kunci : AEC, UMKM, Subsidi Bunga

PENDAHULUAN

Isu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economy Community (AEC)* yang akan diberlakukan pada tahun 2015 semakin hangat diperbincangkan baik di forum-forum resmi, misalnya seminar di kampus-kampus, di kalangan asosiasi bisnis maupun forum nonformal di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa MEA sangat penting artinya bagi kawasan regional, khususnya di kawasan ASEAN dan tentu juga berdampak luas terhadap negara-negara di belahan Barat, Utara dan Selatan pada umumnya. Pada tahun 2015 diperkirakan akan terjadi dinamika perdagangan yang sangat agresif dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN tersebut. Dinamika perdagangan tersebut akan terlihat pada lalu lintas barang dan jasa termasuk tenaga kerja mengikuti mekanisme yang dikendalikan oleh hukum ekonomi, di mana siapa

yang paling siap dan efisien dalam segala aspek maka merekalah yang akan maju pesat, dan sebaliknya siapa (negara) yang tidak siap maka dia bakal akan kalah bersaing.

Untuk memasuki MEA 2015 tersebut terdapat 3 bidang utama yang menjadi fokus yaitu politik dan keamanan, sosial budaya, serta ekonomi. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapannya terhadap dua bidang utama tujuan dari ASEAN Community yaitu bidang politik-keamanan dan bidang sosial budaya. Namun dalam bidang ekonomi masih menjadi perbincangan, termasuk yang sedang kita diskusikan pada hari ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan MEA ini adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan persiapan yang matang, agar Negara-negara ASEAN dan terutama Indonesia dapat memasuki era tersebut dengan berdaya saing. MEA 2015 harus dapat dijadikan sebagai penyemangat dalam upaya meningkatkan daya saing produk dalam negeri kepada bangsa asing pada pasar global.

Berdasarkan potensi pasar, World Economic Forum pada tahun 2010 menempatkan pasar Indonesia pada ranking ke-15, sehingga hal ini berarti bahwa Indonesia adalah pasar potensial bagi negara lain. Seharusnya potensi ini dapat dijadikan sebagai peluang oleh kalangan pelaku bisnis, terutama bagi kelompok UMKM.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus lebih membuka diri dan melihat kenyataan bahwa kompetisi antar bangsa semakin ketat, sehingga jika Indonesia tidak mempersiapkan diri, tentunya akan tertinggal dari negara lain dan bahkan hanya akan menjadi penonton belaka. Dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA 2015 tersebut Negara Indonesia menghadapi banyak permasalahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masalah pembiayaan oleh UMKM. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang akan ditawarkan bagi pasar ASEAN, UMKM harus membayarkan bunga pinjaman yang tinggi. UMKM di Indonesia harus memikul beban bunga yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan beban bunga yang harus dipukul oleh pengusaha di kawasan ASEAN lainnya. Tingkat suku bunga di Indonesia relatif tinggi bila dibandingkan dengan beberapa bank di kawasan ASEAN, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 : Tingkat Suku Bunga Negara-negara Kawasan Asia Pasifik

Negara	Tingkat Suku Bunga Saat Ini	Sebelumnya	Perubahan Terkini
Australia	2.500%	2.750%	08-06-2013 - 04:30
Cina	6,000%	6,310%	07-05-2012 - 11:00
Hong Kong	0,500 %	1,500%	12-17-2008 - 02:00
India	8,000%	7,750%	01-28-2014 - 05:30
Indonesia	7.500%	7,250%	11-12-2013 - 09:00
Jepang	0,100 %	0,300 %	12-19-2008 - 05:27
Philipina	3,500%	3,750%	10-25-2012 - 08:30
Republik Korea	2,250%	2,500%	08-14-2014 - 01:00
Selandia Baru	3,500%	3,250%	07-23-2014 - 21:00
Taiwan	1,875%	1,750%	07-01-2011 - 17:00

Sumber : <http://www.fxstreet.web.id>. Diakses tanggal 20 Oktober 2014

Pada sisi lain di Indonesia terdapat jumlah UMKM yang sangat banyak, yaitu sekitar 57 juta dan 200 ribu koperasi yang memainkan peran penting memberikan kontribusi di sektor ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan memicu pertumbuhan ekonomi. Data statistik dari Kementerian Koperasi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 masih kuat 4,6%, tahun 2011 mencapai 6,5%. Pada 2013 tingkat pertumbuhan PDB masih mencapai 5,8%. Pencapaian ini secara signifikan disumbang oleh UKM dan koperasi terhadap PDB sekitar 56%.

Berdasarkan data dan fakta yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang patut untuk didiskusikan, antara lain sebagai berikut: (1) Bagaimana tingkat daya saing UMKM dalam memasuki era MEA 2015. (2). Kebijakan apa yang dapat dibuat oleh pemerintah untuk memperkuat daya saing UMKM dibidang permodalan?, dan (3). Bagaimana meminergikan program pengentasan kemiskinan dan penguatan daya saing UMKM?

RISE DAN ANALISIS

Tingkat Daya Saing UMKM menghadapi MEA 2015

Saat ini pertanyaan yang harus didiskusikan bukan lagi apakah bangsa Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara ASEAN telah siap atau belum menghadapi MEA 2015, karena MEA sudah di depan mata dan tinggal 2 bulan lagi kita sudah berada di areanya. Justeru pertanyaan yang seharusnya didiskusikan adalah sampai sejauh mana tingkat kesiapan bangsa Indonesia menghadapi MEA 2015. Kalau demikian halnya, maka bangsa Indonesia harus mengevaluasi titik-titik lemah dalam bidang-bidang yang strategis. Salah satu bidang yang strategis adalah berkaitan dengan masalah daya saing UMKM. Masalah daya saing UMKM menjadi strategis, karena UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional dan regional (ASEAN), yang ditunjukkan oleh kontribusinya dalam pembentukan PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja. Sekitar 97,2% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia bekerja pada kelompok UMKM yang berjumlah lebih dari 55,2 juta atau terbesar di ASEAN. Untuk itu bangsa Indonesia harus mampu menjadi penggerak utama dalam pengembangan UMKM di ASEAN.

Selama tidak ada perbaikan mendasar untuk mengurangi berbagai hambatan dalam menjalankan bisnis di Indonesia, maka UMKM akan semakin kehilangan daya saing dan semakin berat untuk menghadapi MEA pada Tahun 2015 mendatang. Hingga saat ini, sejumlah hambatan seperti tidak efisiensi birokrasi, korupsi, dan jaringan infrastruktur yang tidak memadai menduduki peringkat teratas pada persoalan utama dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ketua Focus Group UMKM Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ina Primiana pada Focus Group Discussion ISEI bertajuk Kesiapan UMKM Indonesia Menghadapi Asean Economic Community 2015 di Jakarta. Berdasarkan data *Global Competitiveness Report* (GCR) 2012-2013 yang dilansir oleh *World Economic Forum*, dari 16 persoalan, 3 persoalan tersebut menduduki peringkat tiga teratas. Dengan demikian maka pemerintah mesti segera melakukan identifikasi

terhadap seluruh kelemahan dan hambatan dari UMKM dengan memperhatikan pilar – pilar yang memiliki peringkat rendah menurut berbagai laporan lembaga asing. Menurut Ina Primiana, pada saat yang sama, pemerintah juga mesti melakukan pemetaan untuk menginventarisir UMKM yang memiliki potensi berikut pasar yang dimiliki untuk menetapkan posisi dan keunggulan dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Selanjutnya Ina Primiana, menjelaskan bahwa hal tersebut sangat penting mengingat MEA sudah di depan mata sementara ranking daya saing Indonesia terhadap sejumlah negara ASEAN lainnya masih memprihatinkan. Indonesia jauh tertinggal oleh Singapura yang menduduki peringkat ke – 2 pada Tahun 2012 – 2013. Bahkan Indonesia tidak mampu mengungguli Malaysia dan Thailand. Malaysia menduduki peringkat 25 dan Thailand 38, sementara Indonesia hanya bisa bertengger di posisi 50. Negara Indonesia bahkan tidak bisa mempertahankan posisinya pada Tahun 2011 – 2012 yang sempat berada di posisi 46. Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur daya saing tersebut adalah institusi pemerintahan, infrastruktur, lingkungan makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan lanjutan dan pelatihan, efisiensi pasar yang baik, efisiensi tenaga kerja, pengembangan keuangan pasar, kesiapan teknologi, jaringan pemasaran, kerumitan dalam berbisnis, dan inovasi.

Memperkuat Daya Saing UMKM Melalui Kebijakan Subsidi Bunga

Untuk memperkuat daya saing UMKM, pada masa lalu sebenarnya pemerintah bersama dengan Bank Indonesia telah menstimulus berkembangnya UMKM dengan berbagai program diantaranya memperluas bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank Indonesia telah mengambil beberapa langkah dalam stimulus tersebut antara lain; percepatan dalam hal proses penyaluran kredit, meringankan syarat dan ketentuan peminjaman kredit seperti bunga, agunan atau tanpa agunan dengan plafon kredit yang beragam, memberikan kredit melalui skim khusus (UMKM yang tergabung dalam klaster atau melakukan kemitraan dengan usaha besar). Selain itu BI juga memberikan bantuan teknis & pendampingan karena 60%-70% dari 51.3 juta para pelaku usaha mikro kecil dan menengah masuk dalam kategori “*unbankable*” atau belum mendapat akses layanan perbankan.

Masalah permodalan atau finansial dalam pengembangan bisnis UMKM merupakan masalah yang sangat klasik. Selama ini, memang belum banyak UMKM yang bisa memanfaatkan skema pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Hasil survey *Regional Development Institute* (REDI, 2002) menyebutkan bahwa ada 3 gap yang dihadapi berkaitan dengan akses finansial bagi UMKM, yaitu (1) aspek formalitas, karena banyak UKM yang tidak memiliki legal status; (2) aspek skala usaha, dimana sering sekali skema kredit yang disiapkan perbankan tidak sejalan dengan skala usaha UMKM; dan (3) aspek informasi, dimana perbankan tidak tahu UMKM mana yang harus dibiayai, sementara itu UMKM juga tidak tahu skema pembiayaan apa yang tersedia di perbankan. Untuk

mengatasi masalah ketiga gap ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya berupa peningkatan kemampuan bagi SDM yang dimiliki UMKM, perbankan, serta pendamping UMKM. Pada sisi lain, juga telah diberikan informasi yang luas tentang skema-skema pembiayaan yang dimiliki perbankan.

Selain masalah gap yang digambarkan di atas, ada suatu aspek yang berperan signifikan dalam menentukan keunggulan UMKM bersaing dengan pengusaha yang ada di Negara-negara Asean, yaitu masalah tingkat suku bunga yang tinggi. Perbandingan tingkat suku bunga bank di China dan beberapa bank di Indonesia disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 : Tingkat Suku Bunga untuk Kredit Usaha Perbankan di China dan Indonesia

Bank	Kredit Usaha		
	Mikro	Ritel	Korporasi
Bank Of China Limited	6.07%	6.07%	6.07%
Pt Bank Bukopin, Tbk	16.46%	15.56%	13.75%
Pt Bank Mandiri (Persero), Tbk	22.00%	12.50%	10.50%
Pt Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk		12.35%	11.00%
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	19.25%	11.75%	11.00%

Sumber: <http://www.seputarforex.com>. Diakses tanggal 20 Oktober 2014.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tingkat suku bunga bagi usaha mikro di China adalah sebesar 6,07%, sedangkan di Indonesia paling rendah 16,46% dan paling tinggi 22% (hampir 4 kali lipat tingkat suku bunga di per bankan China). Di Indonesia tingkat suku bunga bagi usaha korporasi jauh lebih rendah dari pada tingkat suku bunga bagi usaha mikro, sedangkan di China tingkat suku bunga bagi usaha mikro dan korporasi sama saja, yaitu 6,07%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga perbankan di Indonesia tidak berpihak pada UMKM.

Untuk meningkat daya saing UMKM pemerintah tidak perlu membuat kebijakan moneter (menurunkan tingkat suku bunga kredit bagi usaha mikro), melainkan kebijakan fiskal saja. Kebijakan fiskal yang akan dibuat oleh pemerintah adalah berupa pemberian subsidi bunga kredit bagi UMKM. Pemberian subsidi adalah merupakan salah satu bukti tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran atau output (Spenser, 1993). Selanjutnya Suparmoko (2003), menjelaskan bahwa subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil jika mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Selanjutnya Suparmoko (2003), membedakan subsidi dalam dua bentuk, yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (*inkind subsidy*).

Kebijakan subsidi muncul pertama kali diterapkan di Inggris pada abad 10-11 dibawah kekuasaan Raja Charles II. Namun, subsidi baru berkembang dan meluas pada abad 20. Sejak saat itu program-program subsidi menjadi sebuah cara yang lazim digunakan pemerintah dalam anggaran keuangannya.

Ada beberapa macam subsidi yang dapat dilakukan, antara lain *price distorting subsidies* dan *cash grant*. *Price distorting subsidies* adalah merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk pengurangan harga di bawah harga pasar sehingga menstimulus masyarakat untuk meningkatkan konsumsi atau pembelian komoditi tersebut. Akibat harga yang dibayarkan lebih rendah dari harga pasar, dan pemerintah yang menanggung atau membayar selisih harga tersebut. Sedangkan *cash grant* adalah merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah uang tunai dan alokasi konsumsi akan uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Pemberian subsidi dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif (Suparmoko, 2005). Dampak positif dari pemberian subsidi adalah berupa eksternalitas positif yang bertujuan menambah output lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut, misalnya pendidikan dan teknologi tinggi. Pemberian subsidi pada bidang pendidikan akan memiliki dampak yang berlipat ganda pada berbagai aspek kehidupan dan masyarakat seperti bidang sosial, budaya, kesehatan, dan perekonomian. Sedangkan dampak negatif dari pemberian subsidi adalah menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan distorsi harga. Dengan adanya subsidi, tentu konsumen akan membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah dari pada harga pasar. Hal ini akan membuat konsumen cenderung tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi tersebut. Pada gilirannya harga yang disubsidi akan menjadi lebih rendah dari pada biaya kesempatan (*opportunity cost*), maka terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang yang disubsidi tersebut.

Adanya pemberian subsidi pada suatu barang atau jasa tertentu akan mengakibatkan harga barang atau jasa lainnya menjadi terdistorsi. Misalnya harga BBM mengandung subsidi, tentu semua harga dari barang dan jasa yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan penggunaan BBM harganya akan terpengaruh atau terdistorsi. Sehingga ketika unsur subsidinya dikurangi atau dihilangkan, maka harga barang dan jasa yang terkait secara langsung atau tidak langsung tersebut akan mengalami kenaikan. Itu sebabnya, ketika akan mengambil keputusan akan mengurangi subsidi BBM, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang paling sulit. Kalau tidak dikurangi subsidi BBM, beban APBN berat, dan kalau dikurangi subsidi BBM maka beban masyarakat miskin dan hampr miskin semakin berat atau kesejahteraannya semakin turun.

Selanjutnya menurut Basri (2002), subsidi yang tidak transparan dan tidak *well-targeted* akan mengakibatkan terjadinya beberapa masalah, antara lain (1) subsidi besar yang digunakan untuk program yang sifatnya populis cenderung menciptakan distorsi baru dalam perekonomian, (2) subsidi menciptakan suatu inefisiensi; dan (3) subsidi sering tidak dinikmati oleh mereka yang berhak.

Pada umumnya pemberian subsidi dikaitkan dengan harga suatu barang, misalnya dengan harga energy (subsidi BBM). Selain subsidi harga energy, pemerintah juga telah memberikan subsidi

non-energi. Subsidi non-energi diberikan pemerintah untuk berbagai sektor diantaranya subsidi pangan, pupuk, benih, PSO (public service obligation), kredit program, minyak goreng, pajak, kedelai dan lainnya (Ginting, 2013). Subsidi kredit program adalah subsidi yang disediakan untuk menutup selisih antara bunga pasar dengan bunga yang ditetapkan lebih rendah oleh pemerintah sebagai skim kredit. Program kredit tersebut antara lain mencakup Kredit Usaha Tani, Kredit Koperasi, Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana (KPRS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), termasuk beban resiko (*risk sharing*) bagi kredit yang tidak dapat ditagih kembali (*default*) (Departemen Keuangan RI, 2001). Selanjutnya kredit program lainnya mencakup Kredit Ketahanan Pangan (KPP), Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KPPA) (Departemen Keuangan RI, 2003). Tujuan subsidi bunga kredit program adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari bunga pasar (Departemen Keuangan RI, 2005).

Subsidi kredit bunga program merupakan subsidi non-energi yang diberikan langsung kepada pihak yang membutuhkan, sehingga subsidi tersebut tepat sasaran. Pemberian subsidi yang tepat sasaran tentunya akan berdampak terhadap tujuan dari pemberian subsidi, karena salah satu tujuan kebijakan pemberian subsidi adalah agar dapat menambah output lebih banyak. Peningkatan output yang lebih banyak secara nasional yang berkala dan kontinu akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2013) ditemukan bahwa subsidi non-energi yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan hasil yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa setiap rupiah pengeluaran subsidi non-energi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Subsidi non-energi yang memiliki porsi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan subsidi energi ternyata memberikan manfaat yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan hasil analisis regresi yang dilakukan bahwa subsidi non-energi berdampak positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena pemberian subsidi ini tepat sasaran terhadap target awal dari subsidi, sehingga subsidi tersebut dapat dirasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang menganjurkan agar pemerintah Indonesia menepati komitmen untuk menghapus subsidi bahan bakar fosil pada tahun 2014 dan mengurangi subsidi listrik. Organisasi itu juga menekankan sosialisasi secara luas tentang manfaat penghapusan subsidi serta pengalihannya kepada bantuan tunai langsung yang tepat sasaran (Bisnis Indonesia, Selasa 2 November 2010, h.1). Penghapusan subsidi ini sudah sejalan dengan *roadmap* pemerintah yang merencanakan menghapus subsidi BBM pada tahun 2014 dan mengurangi subsidi listrik pada tahun-tahun mendatang. Namun saran dari OECD mengenai penghapusan subsidi energi ditolak oleh Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Guru Besar FE UI. Menurutnya, negara maju pun masih membutuhkan subsidi. Khusus untuk Indonesia rencana penghapusan itu dinilai tidak tepat

waktu. Struktur ekonomi Indonesia tidak sama dengan kondisi negara G-20 lainnya dan karena itu membutuhkan waktu lama yang tidak cukup sampai tahun 2014. Pencabutan subsidi bila dipaksakan akan menimbulkan dampak negatif dan yang dikhawatirkan malah mempunyai dampak terjadinya resesi sebagaimana pernah dialami Jepang pada masa yang lalu. Dampak pencabutan subsidi juga akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, pencabutan subsidi akan secara langsung menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat ini pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya peningkatan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia (Neraca , Rabu 3 November 2010. h.1).

Mekanisme Pemberian Subsidi Bunga Untuk Pemberdayaan UMKM

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh UMKM menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat di era MEA adalah tingginya tingkat suku bunga. Beban tingkat suku bunga yang tinggi ini dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan melalui kebijakan ekonomi makro berupa pemberian subsidi bunga. Pemberian subsidi bunga dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah atau pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga perbankan yang ada di daerah tempat UMKM tersebut melakukan usaha sesuai dengan skim kredit yang ada diperbankan tersebut. Pemerintah tidak perlu menyediakan dana atau anggaran sebanyak dana yang dibutuhkan untuk bantuan permodalan UMKM, melainkan cukup menyediakan anggaran sebanyak subsidi bunga yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Kebijakan subsidi bunga yang diterapkan oleh pemerintah, dapat berupa tanggungan bunga sebagian atau seluruh beban bunga. Apakah beban bunga akan ditanggung sebagian atau seluruhnya sangat tergantung pada kondisi persaingan pasar. Bila UMKM memikul beban bunga yang tinggi tentu harga pokok produksi akan tinggi, dan pada gilirannya harga jualnya tentu akan tinggi pula. Atau kalau ingin menyamakan dengan tingkat suku bunga yang berlaku di China, tentu beban bunga yang akan ditanggung oleh pemerintah adalah sebesar selisih tingkat suku bunga yang berlaku pada perbankan di Indonesia dengan tingkat suku bunga di China.

Untuk melaksanakan kebijakan ini maka pemerintah atau pemerintah daerah harus menyediakan bantuan teknis dan pendampingan dalam penggunaan dana perbankan tersebut. Bila pendekatan ini yang dilakukan oleh pemerintah, maka UMKM akan terbiasa untuk berusaha atau berbisnis seperti korporasi lainnya, hanya saja UMKM diberikan bantuan bunga sesuai dengan tingkat kemampuannya. Sementara masalah pembinaan dan pengembangan UMKM tetap harus dilakukan oleh kementerian terkait secara sistematis dan terencana.

Penguatan daya saing UMKM melalui kebijakan pemberian subsidi bunga memiliki beberapa keunggulan, antara lain; (1). Kebijakan ini akan mencapai pemberian subsidi yang tepat sasaran. Artinya bantuan subsidi bunga yang ditawarkan pemerintah pada pelaku usaha atau UMKM, hanya akan diambil bagi pelaku usaha yang membutuhkan saja, sedangkan bagi UMKM yang tidak mengembangkan usaha atau dalam pengembangan usahanya tidak membutuhkan tambahan modal

tentu tidak akan mengambil pinjaman dan tentu tidak akan mendapat subsidi bunga. (2). Pemberian subsidi bunga ini akan memberikan insentif bagi UMKM untuk mengembangkan usaha, karena tidak perlu memikirkan beban bunga. (3). Untuk penyaluran kredit pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru, karena penambahan lembaga baru untuk penyaluran kredit hanya akan menambah birokrasi saja. Selain itu perbankan sudah merupakan lembaga keuangan yang professional dan berpengalaman dalam penyaluran kredit. (4). Menghemat anggaran belanja (APBN/APBD) untuk membantu penguatan daya saing UMKM dalam membiayai pengembangan usahanya. Misalnya untuk pengembangan UMKM pada suatu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dibutuhkan dana guna peningkatan modal sebanyak Rp 25 milyar dan pada saat yang sama tingkat bunga bank yang berlaku adalah sebesar 15%. Bila pemerintah ingin menanggung semua beban bunga perbankan tersebut, maka pada APBD Kabupaten tersebut cukup dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 3,75 milyar saja. Apalagi kalau pemerintah hanya ingin menyamakan dengan tingkat suku bunga yang berlaku di China, tentu alokasi anggrannya cukup sebesar Rp. 2,25 milyar saja.

SIMPULAN

MEA sudah di depan mata sementara rangking daya saing Indonesia terhadap sejumlah negara ASEAN lainnya masih memprihatinkan. Indonesia jauh tertinggal oleh Singapura yang menduduki peringkat ke - 2 pada Tahun 2012 - 2013. Bahkan Indonesia tidak mampu mengungguli Malaysia (peringkat 25) dan Thailand (peringkat 38), sementara Indonesia hanya bisa bertengger di posisi 50. Dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA 2015 tersebut UMKM Indonesia menghadapi banyak permasalahan. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang akan ditawarkan bagi pasar ASEAN, UMKM harus membayarkan bunga pinjaman yang tinggi. Walaupun pemerintah dan Bank Indonesia telah membuat berbagai macam skim kredit dan bantuan teknis untuk meningkatkan daya saing UMKM, namun UMKM tersebut masih belum mampu mengakses layanan kredit perbankan yang disediakan. Untuk itu dalam rangka penguatan daya saing UMKM, maka pemerintah perlu merumuskan suatu kebijakan pemberian subsidi bunga. Melalui kebijakan pemberian subsidi bunga, maka pemerintah dapat mencapai pemberian subsidi yang tepat sasaran, memberikan insentif pada UMKM untuk mengembangkan usahanya, menghemat anggaran dan tidak perlu membentuk lembaga baru yang akan yang menyalurkan kredit.

DAFTAR RUJUKAN

- Basri, F. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Departemen Keuangan RI. *Data Pokok APBN 2001-2010*.
- Departemen Keuangan RI. *Nota Keuangan dan RAPBN 2011*.
- Handoko R. & P. Patriadi. 2005. *Evaluasi Kebijakan Subsidi Non-BBM*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*. 9 (4):88-105.

- Ginting, Ari Mulianta, 2013. *Bagian Kesatu Analisa Kebijakan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. <http://berkas.dpr.go.id>. Diakses 7 Oktober 2014.
- Romer, D. 1996. *Advance Macroeconomics*. New York McGraw-Hill. United States.
- Spenser, M. H. and O. M.. Amos Jr. 1993. *Contemporary Economics*. Edisi 8. New York. Whort Publishers.
- Suparmoko, M. 2003. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi ke-5. Yogyakarta. BPFE.